



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED



STASIUN PSDKP AMBON

Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2021

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun PSDKP Ambon adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, Januari 2022
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Ambon



Abdul Quddus, S. St. Pi, M.P
NIP. 19830131 200604 1 002

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	59
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON

Jln. Sultan Hasanuddin, Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 97128
Tlp. (0911) 351783, Fax. (0911) 351781,
Laman : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon - Email : psdkp.ambon@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, Januari 2022
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Ambon,



Abdul Qaddus, S. St. Pi, M.P
NIP. 19830131 200604 1 002

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Ambon Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. Rp30.953.684,00. Sedangkan pada Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.621.820.818,00 atau mencapai 99,33% dari alokasi anggaran sebesar Rp20.764.650.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.484.657.008,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp167.440.733,00. Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.317.216.275,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban jangka pendek Rp10.914.681,00 dan Ekuitas sebesar Rp30.473.742.327,00. Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp30.484.657.008,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional kegiatan, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.535.000,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18.279.585.931,00.

Pendapatan dari kegiatan nonoperasional lainnya sebesar Rp8.932.084,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0,00 sehingga terdapat defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp(1.602.301.142,00). Dan defisit pos-pos luar biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(19.880.352.073,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp29.869.932.568,00. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(19.880.352.073,00). kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20.484.161.832,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp30.473.742.327,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		%thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	30.953.684,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	30.953.684,00	-
BELANJA	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	4.595.784.000,00	4.590.178.989,00	99,88
Belanja Barang	B.4	9.748.986.000,00	9.621.288.704,00	98,73
Belanja Modal	B.5	6.419.880.000,00	6.410.353.125,00	99,85
JUMLAH BELANJA		20.764.650.000,00	20.621.820.818,00	99,33

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020	Kenaikan (Penurunan)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00	(0,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	61.458.333,00	97.975.000,00	(37,27)
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-	-
Persediaan	C.10	105.982.400,00	199.957.800,00	(47,00)
Jumlah Aset Lancar		167.440.733,00	297.932.800,00	(43,80)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-	-
ASET TETAP				
Tanah	C.14	6.248.730.383,00	6.248.730.383,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.15	43.356.586.207,00	41.431.311.937,00	4,65
Gedung dan Bangunan	C.16	7.288.390.955,00	5.199.295.547,00	40,18

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	512.761.400,00	497.448.000,00	3,08
Aset Tetap Lainnya	C.18	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	239.903.713,00	169.252.213,00	41,74
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(27.337.131.383,00)	(23.972.424.864,00)	14,04
Jumlah Aset Tetap		30.317.216.275,00	29.581.588.216,00	2,49
ASET LAINNYA				
Aset Tidak Berwujud	C.21	0	0	0
Aset Lain-Lain	C.22	0	102.958.500,00	(100,00)
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	0	(99.275.478,00)	(100,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	3.683.022,00	(100,00)
JUMLAH ASET		30.484.657.008,00	29.883.204.038,00	2,01
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	C.24	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	10.914.681,00	13.271.470,00	(17,76)
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.914.681,00	13.271.470,00	(17,76)
JUMLAH KEWAJIBAN		10.914.681,00	13.271.470,00	(17,76)
EKUITAS DANA				
Ekuitas	C.28	30.473.742.327,00	29.869.932.568,00	2,02
JUMLAH EKUITAS DANA		30.473.742.327,00	29.869.932.568,00	2,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30.484.657.008,00	29.883.204.038,00	2,01

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020	Kenaikan (Penurunan)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
	D.1			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		1.535.000,00	-	
JUMLAH PENDAPATAN		1.535.000,00	-	0
BEBAN				
Beban Pegawai	D.2	4.584.586.989,00	4.094.809.896,00	11,961
Beban Persediaan	D.3	149.437.100,00	270.805.589,00	(44,82)
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.756.771.134,00	7.020.749.593,00	(3,76)
Beban Pemeliharaan	D.5	1.434.819.295,00	1.923.607.416,00	(25,41)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.413.988.453,00	1.468.025.222,00	(3,681)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-	
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.939.982.960,00	4.242.971.419,00	(7,14)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-	
JUMLAH BEBAN		18.279.585.931,00	19.020.969.135,00	(3,898)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL				
		(18.278.050.931,00)	(19.020.969.135,00)	(3,906)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	D.11			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		20.486.600,00	88.458.465,00	(76,84)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1,631,719,826	0	0
Surplus/(defisit) Selisih Pelepasan Aset Non Lancar		(1,611,233,226)	88,458,465	1,921,45
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.932.084,00	2.644.844,00	237,717
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	1.692.800,00	(100)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		8.932.084,00	952.044,00	838,20
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NOPERASIONAL				
		(1.602.301.142,00)	89.410.509,00	(1.892,07)
POS LUAR BIASA				
	D.12			
Beban luar biasa		0	0	0
Surplus (Defisit) dari pos luar biasa		0	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(19.880.352.073,00)	(18.931.558.626,00)	(5,01)

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN
31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) %
EKUITAS AWAL	E.1	29.869.932.568,00	36.182.933.641,00	(17,45)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(19.880.352.073,00)	(18.931.558.626,00)	5,01
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	(3.408.297.740,00)	100,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0,00	0,00	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0,00	(5.663.681.000,00)	(100,00)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	0,00	2.255.383.260,00	(100,00)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0,00	0,00	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	20.484.161.832,00	16.026.855.293,00	27,81
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	603.809.759,00	(6.313.001.073,00)	(109,56)
EKUITAS AKHIR	E.6	30.473.742.327,00	29.869.932.568,00	2,02

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Ambon

Dasar Hukum Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Entitas dan Ambon merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis
Rencana Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Strategis dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 714 dan 715. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di

emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Ambon berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.

Stasiun PSDKP Ambon memiliki Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 49 orang dan Pegawai honor PPNPN sebanyak 30 orang. Stasiun PSDKP Ambon di pimpin oleh

Kepala Stasiun dengan level setara eselon 4 dan dibantu oleh 1 (satu) eselon 5 yaitu Pelaksana Urusan Tata Usaha.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi. Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan T.A. 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutase persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Ambon adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO
 - dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan

ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan

dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

✚ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

✚ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

✚ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

h. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Pengawasan SDKP Ambon telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 12 (dua belas) kali dari DIPA awal. Pagu awal sebesar Rp26.394.987.000,- setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp20.764.650.000,-. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan KRO baru yaitu Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan, Penambahan Sub Komponen pada RO Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun, serta penambahan anggaran suku cadang armada pengawasan. Selain terjadi penambahan pagu anggaran, Stasiun PSDKP juga mengalami refocusing anggaran sebanyak 4 (empat) tahap. Sampai periode berjalan Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 12 (dua belas) kali.

Berikut daftar rincian revisi DIPA :

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatam Jasa		
Pendapatan Lain-Lain		
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	4,979,396,000	4,595,784,000
Belanja Barang	14,874,591,000	9,748,986,000
Belanja Modal	6,541,000,000	6,419,880,000
Jumlah Belanja	26,394,987,000	20,764,650,000

Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 ini, Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 12 (dua belas) kali dengan keterangan sebagai berikut :

- **Revisi DIPA ke 01** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 08 Januari 2021, kode *Digital Stamp (DS)* : 3084-3359-4907-2366 dengan Nilai Pagu Anggaran

Rp26.394.987.000. Revisi I merupakan revisi kewenangan DJA. Digital Stamp mengalami perubahan, karena revisi 1 merupakan revisi buka blokir, disebabkan adanya perubahan nomenklatur pada sub komponen semula Perluasan Bangunan Fungsional Stasiun PSDKP Ambon Tahap II menjadi Bangunan Pos Pengawasan PSDKP dan terdapat kekurangan data dukung dalam penyusunan anggaran Stasiun PSDKP Ambon TA. 2021.

- **Revisi DIPA ke 02** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 21 Januari 2021, kode *Digital Stamp (DS)* : 3084-3359-4907-2366 dengan Nilai Pagu Anggaran 26.394.987.000.

Revisi 2 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Digital stamp tidak mengalami perubahan. Pada revisi 2 dilakukan pergantian akun karena terdapat kesalahan pencantuman akun pada RO Operasional Logistik Kapal Pengawas, yaitu akun 521211 dan 522191. Selain itu terdapat pergeseran antar RO dalam KRO yang sama yaitu:

- ✓ Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun;
- ✓ Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran; dan
- ✓ Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan lingkup DJPSDKP.

- **Revisi DIPA ke 03** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 16 Februari 2021, kode *Digital Stamp (DS)* : 1505-9428-7385-1308 dengan Nilai Pagu Anggaran 26.388.987.000. Revisi 3 merupakan revisi Refocusing I. Digital Stamp mengalami perubahan. Adapun anggaran yang mengalami refocusing adalah yang mendapat blokir yaitu pada RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan

lingkup DJPSDKP yaitu Pembinaan fisik dan mental pegawai.

- **Revisi DIPA ke 04** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 16 September 2020, kode *Digital Stamp (DS)* : 5908-1422-6328-2501 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp29.842.783.000.

Revisi 4 merupakan revisi kewenangan DJA. Digital stamp mengalami perubahan. Revisi 4 merupakan revisi pemanfaatan dan perubahan Halaman III DIPA. Adapun usulan pemanfaatan pada revisi 4 yaitu:

- ✓ Penambahan KRO baru yaitu Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dengan pagu Rp50.000.000;
 - ✓ Penambahan Sub Komponen pada RO Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun diantaranya:
 - a. Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP pagu Rp1.672.220.000;
 - b. Pembangunan Bangunan Operator pagu Rp1.071.576.000;
 - c. Perencanaan Pembangunan Dermaga Stasiun PSDKP Ambon pagu Rp300.000.000.
 - ✓ Penambahan anggaran suku cadang pada RO Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebesar Rp360.000.000.
- **Revisi DIPA ke 05** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 10 Agustus 2020, kode *Digital Stamp (DS)* : 1388-6449-4654-9036 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp29.556.783.000. Revisi 5 merupakan revisi kewenangan DJA. Revisi ini merubah Digital stamp. Revisi 5 adalah revisi Refocusing Tahap II, yaitu pengurangan Tunjangan Kinerja 13 dan THR Tunjangan Kinerja serta pergeseran anggaran antar kegiatan

maupun antar RO, diantaranya:

- ✓ Penambahan anggaran pada Sub komponen Perencanaan Pembangunan Dermaga Stasiun PSDKP Ambon;
 - ✓ Penambahan anggaran pada KRO Penanganan Perkara sebanyak Rp107.910.000 karena terdapat penambahan output kasus sebanyak 3 kasus yang telah P21. Sumber penambahan berasal dari BBM Kapal Pengawas pada kegiatan Pemantauan, Operasi Armada, dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan. Output KRO menjadi 15 perkara;
 - ✓ Sisa pengadaan kendaraan operasional roda 4 Satwas SDKP Ternate dioptimalisasi untuk pengadaan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 2 unit sehingga output pada KRO Layanan Saranan Internal menjadi 55 unit.
- **Revisi DIPA ke 06** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 08 Juli 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 1388-6449-4654-9036 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp29.556.783.000. Revisi 6 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Revisi ini tidak merubah digital stamp. Revisi 6 adalah revisi penambahan akun PC – PEN pada seluruh kegiatan dan revisi perubahan halaman III DIPA. Adapun rincian revisi adalah :
 1. Penambahan akun Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 522912 pada seluruh kegiatan;
 2. Penambahan akun Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 521131 pada RO Operasi Kapal Pengawas, RO Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dan RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan lingkup DJPSDKP.

• **Revisi DIPA ke 07** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 22 Juli 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 7607-3020-6554-7006 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp24.966.872.000.- Revisi 7 merupakan revisi refocusing Tahap III dan termasuk kewenangan DJA. Pada revisi ini terdapat penghapusan/penghematan pada KRO dan RO. Terdapat pengurangan pagu sebesar Rp 4.589.911.000,-. Pagu sebelum revisi Rp29.556.783.000,- menjadi Rp24.966.872.000,-. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Penghapusan KRO 2350.CAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp50.000.000,-
2. Penghematan pada KRO 2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam sebesar Rp432.115.000,-
3. Penghematan pada KRO 2350.RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan sebesar Rp3.082.618.000,-. Sumber penghematan berasal dari penghapusan kegiatan fisik bangunan pos pengawasan SDKP dan pembangunan bangunan operator
4. Penghematan pada KRO 2351.AEA Koordinasi TPKP sebesar Rp40.598.000,-
5. Penghematan pada KRO 2351.BCE Penanganan Perkara sebesar Rp32.665.000,-
6. Penghematan pada KRO 2352.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp25.800.000,-
7. Penghematan pada KRO 2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp197.290.000,-
8. Penghematan pada KRO 2353.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp64.050.000,-
9. Penghematan pada KRO 2353.QIC Pengawasan

- dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp242.767.000,-
10. Penghematan pada KRO 2355.EAA Layanan Perkantoran sebesar Rp122.308.000,-
 11. Penghematan pada KRO 2355.EAC Layanan Umum sebesar Rp24.550.000,-
 12. Penghematan pada KRO 2355.EAD Layanan Sarana Internal sebesar Rp78.800.000,-
 13. Penghematan pada KRO 2355.EAF Layanan SDM sebesar Rp97.150.000,-
 14. Penghematan pada KRO 2355.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan sebesar Rp99.200.000,-

- **Revisi DIPA ke 08** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 760-0690-6700-0525 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000. Revisi 8 merupakan revisi anggaran refocusing Tahap IV termasuk kewenangan DJA. Terdapat pengurangan pagu sebesar Rp4.202.222.000,-. Pagu sebelum revisi Rp24.966.872.000,- menjadi Rp20.764.650.000,-. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Penghematan pada KRO 2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam sebesar Rp2.679.751.000,-
2. Penghematan pada KRO 2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan sebesar Rp1.451.256.000,-
3. Penghematan pada KRO 2351.AEA Koordinasi TPKP sebesar Rp48.402.000,-
4. Penghematan pada KRO 2351.BCE Penanganan Perkara sebesar Rp2.215.000,-
5. Penghematan pada KRO 2353.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp20.598.000,-

- **Revisi DIPA ke 09** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 760-0690-6700-0525 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000,-. Revisi 9 merupakan revisi kewenangan Kanwil DJPB. Adapun revisi yang dilakukan yaitu pergeseran anggaran dalam RO yang sama tidak mengurangi pagu RO dan volume output.

- **Revisi DIPA ke 10** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 4651-6012-4602-9785 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000,00. Revisi 10 merupakan revisi kewenangan DJA. Adapun revisi yang dilakukan yaitu pada :
 1. Revisi antar KRO pada 2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam, ke 2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, yaitu: Pengurangan RO 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas (PEN) dari belanja dukungan penanganan pandemi COVID-19 Awak Kapal Pengawas sebesar Rp20.000.000,00 ke RO 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat (PEN);
 2. Kekurangan belanja perawatan darurat Kapal Pengawas HIU 13 dikarenakan adanya tagihan dari penyedia tanggal 29 September 2021 sebesar Rp31.900.000,00, sedangkan sisa anggaran sampai dengan 19 Oktober 2021 adalah Rp17.150.475,00

- **Revisi DIPA ke 11** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 29 November 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 6109-0013-0440-5012 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000,00. Revisi 11 merupakan revisi

kewenangan kanwil DJPB. Adapun revisi yang dilakukan untuk:

1. pemenuhan belanja operasional. Terdapat kelebihan anggaran pada RO 2355.EAA.001 yaitu pada belanja pegawai sebesar Rp97.612.000,- dan digeser ke RO 2355.EAA.002 untuk memenuhi operasional dan pemeliharaan kantor sampai dengan akhir tahun;
2. penambahan volume output RO 2355.EAD.003 yaitu belanja mesin pemotong rumput, sehingga volume output semula 35 unit menjadi 36 unit; dan
3. pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama.

- **Revisi DIPA ke 12** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 6109-0013-0440-5012 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000,00. Revisi 12 merupakan revisi pemutakhiran data POK.

Stasiun PSDKP Ambon mendapatkan tagging terkait PC-PEN pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.259.867.000,00 pada RO 2350.BID.001 yaitu kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya; 2350.QHD.001 yaitu kegiatan Operasi Kapal Pengawas; dan 2350.RCG.001 yaitu kegiatan Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat. Sampai dengan tanggal 31 desember 2021, realisasi sebesar Rp6.226.850,00 atau 99,46%. Berikut realisasi belanja akun PC-PEN TA. 2021

*Tabel Realisasi belanja PC-PEN Stasiun PSDKP Ambon
TA. 2021*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	11,100,000	10,679,000	96.21
2	Operasi Kapal Pengawas	3,753,731,000	3,731,714,742	99.41
3	Armada Pengawasan SDKP yang dirawat	2,506,136,000	2,494,428,108	99.53
Jumlah		6,259,867,000	6,226,142,850	99.46

Keterangan :

 : Tagging PC-PEN dari Kemenkeu

 : Tagging PC-PEN DIPA Stasiun PSDKP Ambon

Belanja yang bukan merupakan PC-PEN namun mendapatkan tagging dari Kemenkeu adalah RO 2350.BID.001 yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya. Pada DIPA Stasiun PSDKP Ambon, tagging PC-PEN terdapat pada RO 2350.QHD.001 yaitu Operasi Kapal Pengawas, dan RO 2350.RCG.001 yaitu Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat.

Realisasi belanja PC-PEN pada Kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya TA. 2021

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
521211	Belanja Bahan	200,000	-	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,900,000	10,679,000	97.97
Jumlah		11,100,000	10,679,000	96.21

Pagu belanja kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) pada RKAKL sebesar Rp12.600.000,- namun tidak semua masuk kedalam tagging PC-PEN. Hanya sebesar Rp11.100.000,- yang masuk dalam tagging PC-PEN, dengan rincian akun 524111 yaitu Belanja perjalanan dinas dalam rangka tindak lanjut informasi POKMASWAS sebesar Rp10.900.000,- serta pada akun 521211 yaitu belanja bahan Pencetakan Laporan Semester sebesar Rp200.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi pada OMSPAN sebesar Rp 10.679.000,- atau 96,21%.

*Realisasi belanja PC-PEN pada kegiatan
Operasi Kapal Pengawas TA. 2021*

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
052	Penyediaan logistik kapal pengawas	2,978,645,000	2,977,409,850	99.96
A	Dukungan Logistik Kapal			
521211	Belanja Bahan	2,933,855,000	2,932,649,000	99.96
522191	Belanja Jasa Lainnya	27,900,000	27,900,000	100.00
B	Dukungan Logistik Lainnya			
521211	Belanja Bahan	600,000	590,050	98.34
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,290,000	16,270,800	99.88
053	Penyediaan logistik Awak Kapal Pengawas	708,236,000	705,091,542	99.56
A	Dukungan Logistik Awak Kapal Pengawas			
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	67,640,000	67,553,084	99.87
521211	Belanja Bahan	206,400,000	203,487,400	98.59
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	288,328,000	288,212,500	99.96
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130,000,000	129,990,558	99.99
B	Penyegaran Kemampuan Menembak AKP dan Pengawas Perikanan			
521211	Belanja Bahan	10,468,000	10,448,000	99.81
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	5,400,000	100.00
055	Operasional Awak Kapal Pengawas	66,850,000	49,213,350	73.62
A	Medical Check Up Bagi Awak Kapal Pengawas			
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,600,000	14,148,000	90.69
B	Dukungan Penanganan Pandemi COVID-19 Awak Kapal Pengawas			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan	32,250,000	27,700,350	85.89
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,000,000	7,365,000	38.76
Jumlah		3,753,731,000	3,731,714,742	99.41

Pagu belanja pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp3.753.731.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.731.714.742,- atau 99,41%, dengan rincian kegiatan antara lain, Penyedia Logistik Kapal Pengawas, Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas, dan Operasional Awak Kapal Pengawas.

Realisasi belanja PC-PEN pada kegiatan Armada Pengawasan

SDKP yang Dirawat TA. 2021

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
051	Perawatan Pencegahan (preventive) Kapal Pengawas	98,502,000	98,491,680	99.99
A	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,000,000	38,991,580	99.98
B	Pengadaan Suku Cadang			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59,502,000	59,500,100	100.00
052	Perawatan Prediktif (predictive) Kapal Pengawas	1,694,770,000	1,686,589,137	99.52
A	Perawatan Tahunan			
522191	Belanja Jasa Lainnya	39,900,000	39,776,000	99.69
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	250,000	199,000	79.60
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,000,000	187,781,000	98.83
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,840,000	10,850,000	68.50
B	Overhaul Permesinan Kapal Pengawas			
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,420,000	3,420,000	100.00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,200,000	1,050,000	87.50
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,160,000	24,112,297	99.80
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,420,000,000	1,419,400,840	99.96
053	Perawatan Darurat (breakdown maintenance) Kapal Pengawas	291,900,000	290,731,125	99.60
A	Perawatan Darurat Kapal Pengawas			
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	600,000	525,000	87.50
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	279,800,000	278,716,525	99.61
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,500,000	11,489,600	99.91
054	Perawatan Pencegahan (preventive) Speed Boat/Rigid Inflatable Boat	103,800,000	102,793,060	99.03
A	Perawatan Rutin Bulanan			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,800,000	13,792,720	99.95
B	Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Speed Boat/ Rigid Inflatable Boat			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,000,000	89,000,340	98.89
056	Perawatan Darurat (breakdown maintenance) Speed Boat/Rigid Inflatable	317,164,000	315,823,102	99.58
A	Perawatan Darurat			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	317,164,000	315,823,102	99.58
Jumlah		2,506,136,000	2,494,428,104	99.53

Selanjutnya pagu belanja pada kegiatan Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebesar Rp2.506.136.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.494.428.108,- atau 99,53%. Jumlah keseluruhan pagu PC-PEN pada DIPA Stasiun PSDKP sebesar Rp6.259.867.000,- dengan realisasi sebesar Rp6.226.142.850,- atau 99,46% dengan rincian kegiatan

antara lain, Perawatan Pencegahan (preventive) Kapal Pengawas, Perawatan Prediktif (predictive) Kapal Pengawas, Perawatan Darurat (breakdown maintenance) Kapal Pengawas, Perawatan Pencegahan (preventive) Speed Boat/Rigid Inflatable Boat, dan Perawatan Darurat (breakdown maintenance) Speed Boat/Rigid Inflatable.

*Realisasi
Pendapatan
Rp30.953.684,0
0*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.953.684,00. Pendapatan berasal antara lain dari :

- ✓ Penerimaan kembali belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan November dan Desember 2020 a.n Puji Tri Laksono pada yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp8.932.084,00 dengan nomor NTB: 000000274827 dan nomor NTPN : C863A7QLTSP86UN6. Hal ini disebabkan karena belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan November dan Desember 2020 a.n Puji Tri Laksono telah dibayarkan oleh Stasiun PSDKP Ambon, namun UPT yang baru juga melakukan pembayaran.
- ✓ Lelang 1 (satu) unit bongkaran bangunan gedung kantor permanen sesuai Risalah Lelang nomor 92/80/2021 tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp15.072.900,- dengan nomor NTB: 000000720521 dan nomor NTPN : 29F7761QU86S71AC tanggal 28 Juli 2021.
- ✓ Lelang 1 (satu) buah Partisi Bahan Gypsum dan teralis besi sesuai Risalah Lelang nomor 92/80/2021 tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp1.956.200,- dengan nomor NTB: 000000720530 dan nomor NTPN : 8B6D82G4UTTAJ1VQ tanggal 28 Juli 2021.
- ✓ Lelang 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua sesuai Risalah Lelang nomor 101/80/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp3.457.500,- dengan nomot NTB :

000000401369 dan nomor NTPN : BC6FB2G4UU2M11MQ tanggal 09 September 2021.

- ✓ Penerimaan kembali belanja pegawai berupa tunjangan fungsional dan tunjangan umum a.n Lailia Nur Rohmah yang telah dilakukan pembayaran melalui pemotongan gaji induk bulan Oktober 2021 sebesar Rp1.535.000,00. Hal ini disebabkan karena kelebihan pembayaran tunjangan fungsional bulan Mei s/d September 2021 dan tunjangan umum bulan Agustus 2021.

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara	30,953,684	83,193,109	(62.79)
Penerimaan Hibah	-	-	-
Jumlah Belanja	30,953,684	83,193,109	(62.79)

Dari tabel perbandingan diatas terlihat adanya penurunan pendapatan pada tahun 2021, Jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Realisasi

Belanja Negara

Rp20.621.820.818,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan Semester II TA. 2021 adalah sebesar Rp20.621.820.818,00 atau 99,33% dari anggaran belanja sebesar Rp20.764.650.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4,595,784,000	4,590,179,683	99.88
Belanja Barang	9,748,986,000	9,624,840,704	98.73
Belanja Modal	6,419,880,000	6,410,353,125	99.85
Total Belanja Kotor	20,764,650,000	20,625,373,512	99.33
Pengembalian	-	3,552,694	
Jumlah	20,764,650,000	20,621,820,818	99.31

Realisasi anggaran tahun 2021 menurut jenis belanja, seperti pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2021 penyerapan anggaran telah

maksimal yaitu sebesar 99,31%.

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	4,590,178,989	4,089,217,896	12.25
Belanja Barang	9,621,288,704	10,760,668,662	(10.59)
Belanja Modal	6,410,353,125	1,270,155,113	404.69
Jumlah Belanja	20,621,820,818	16,120,041,671	27.93

Realisasi belanja periode Semester II pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 27,93% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

1. Pada belanja pegawai berupa adanya mutasi PNS dari beberapa instansi, antara lain :
 - 7 (tujuh) orang pegawai penyuluh perikanan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon,
 - 1 (satu) orang pegawai pengawas perikanan dari Pangkalan PSDKP Tual,
 - 1 (satu) orang pegawai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur,
 - 1 (satu) orang pegawai dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur,
 - 1 (satu) orang pegawai dari Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pada belanja modal, berupa peralatan dan mesin serta pembangunan fisik gedung dan bangunan Kantor Stasiun PSDKP Ambon.

Belanja Pegawai

Rp4.590.178.989,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun PSKDP Ambon sampai dengan bulan Desember TA 2021 dan TA 2020 sebesar Rp4.590.178.989,00 dan Rp4.089.217.896,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Dibandingkan dengan TA 2020, realisasi belanja pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,25 % jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan adanya mutasi PNS dari beberapa instansi pemerintah sejumlah 11 (sebelas) orang pegawai, antara lain 7 (tujuh) orang pegawai penyuluh perikanan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, 1 (satu) orang pegawai pengawas perikanan dari Pangkalan PSDKP Tual, 1 (satu) orang pegawai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, 1 (satu) orang pegawai dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan 1 (satu) orang pegawai dari Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

*Perbandingan Belanja Pegawai Sampai Dengan
Bulan Desember TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1,817,879,740	1,567,295,320	15.99
Belanja Pembulatan Gaji PNS	30,273	26,549	14.03
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	131,975,196	124,119,862	6.33
Belanja Tunj. Anak PNS	38,223,482	32,752,968	16.70
Belanja Tunj. Struktural PNS	20,520,000	22,680,000	(9.52)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	38,480,000	26,260,000	46.53
Belanja Tunj. Beras PNS	120,579,300	93,494,220	28.97
Belanja Uang Makan PNS	244,894,000	206,715,000	18.47
Belanja Tunjangan Umum PNS	76,850,000	73,150,000	5.06
Belanja Uang Lembur	53,227,000	57,250,000	(7.03)
Belanja Tunj. Khusus/kegiatan	2,047,520,692	1,894,451,821	8.08
Jumlah Belanja Kotor	4,590,179,683	4,098,195,740	12.00
Pengembalian Belanja	694	8,977,844	
Jumlah Belanja	4,590,178,989	4,089,217,896	12.25

Belanja Barang

Rp9.621.288.704,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan Desember TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.621.288.704,00 dan Rp10.760.668.662,00.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	1,695,548,198	1,512,042,030	12.14
Belanja Barang Non Operasional (5212)	4,496,470,573	5,134,892,877	(12.43)
Belanja Barang Persediaan (5218)	120,834,700	368,757,785	(67.23)
Belanja Jasa (5221)	526,644,485	473,773,262	11.16
Belanja Pemeliharaan (5231)	1,369,446,295	1,808,155,486	(24.26)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	1,415,896,453	1,468,025,222	(3.55)
Jumlah Belanja Kotor	9,624,840,704	10,765,646,662	(10.60)
Pengembalian Belanja	3,552,000	4,978,000	
Jumlah Belanja	9,621,288,704	10,760,668,662	(10.59)

- Belanja barang operasional sebesar Rp1.694.674.198,00 terdiri dari : belanja untuk keperluan perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja dan belanja barang untuk operasional-penanganan pandemi COVID-19.
- Belanja barang non operasional sebesar Rp4.496.470.573,00 antara lain belanja bahan seperti cetak laporan, BBM, pelumas, air tawar kapal pengawas, belanja honor output kegiatan serta belanja barang non operasional lainnya seperti konsumsi rapat.
- Belanja barang persediaan barang konsumsi sebesar Rp120.834.700,00 meliputi belanja ATK, komputer Supply, dan suku cadang.
- Belanja barang jasa sebesar Rp 525.874.485,00 meliputi belanja langganan listrik, telepon, air, belanja sewa, belanja jasa lainnya, belanja jasa profesi untuk menunjang kegiatan dan belanja jasa penanganan pandemi COVID-19.
- Belanja pemeliharaan sebesar Rp1.369.446.295,00, yang dilakukan untuk menjaga nilai aset-aset yang ada di Stasiun PSDKP Ambon antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan, kapal pengawas dan *speedboat/rubberboat* pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan mesin.
- Belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp 1.413.988.453,00 meliputi kegiatan pembayaran belanja

perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan luar kota.

Stasiun PSDKP Ambon mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp263.658.000,00 Anggaran tersebut terserap 89,08% yakni sebesar Rp234.876.982,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	143,608,000	138,602,982	96.51
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	120,050,000	96,274,000	80.19
Jumlah		263,658,000	234,876,982	89.08

Rincian belanja Penanganan Pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Akun	Uraian Belanja COVID-19	Realisasi
1	521131	Masker Kesehatan	95,078,337
2		Hand Sanitizer	28,128,370
3		Cairan Disinfektan	12,360,393
4		Biaya Lisensi Aplikasi Video Conference	3,035,882
5	522192	Pemeriksaan Rapid Tes/Swab	96,274,000
Total			234,876,982

Belanja Modal
Rp6.410.353.
125,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan Desember TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.410.353.125,00 dan Rp1.270.155.113,00-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,418,686,270	1,100,902,900	119.70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,976,353,455	185,401,963	2,044.72
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15,313,400	-	
Belanja Modal lainnya		-	
Jumlah Belanja Kotor	6,410,353,125	1,286,304,863	398.35
Pengembalian	-	16,149,750	
Jumlah Belanja	6,410,353,125	1,270,155,113	404.69

Perbandingan nilai Belanja Modal Semester II tahun 2021 dan 2020 pada tabel diatas, memperlihatkan adanya kenaikan realisasi dikarenakan adanya belanja modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp153.971.700,00 serta belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.706.378.505,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp6.410.353.125,00

Belanja Modal Tanah Rp0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Stasiun PSDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada TA 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Sawah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp2.418.686.270,
00*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan bulan September TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.418.686.270,00 dan Rp1.100.902.900,00. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
PERALATAN DAN MESIN	unit/buah	69	2,418,686,270
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	534,000,000
Sepeda Motor	Unit	2	37,200,000
Kursi Roda	Buah	1	1,650,000
Kapal Pengawas Perikanan	Unit	0	1,419,400,840
PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	2	4,365,515
Alat Ukur Universal Lainnya	Buah	4	15,135,765
Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	25,500,000
Lemari Besi/Metal	Buah	4	12,540,000
Meja Kerja Kayu	Buah	6	27,390,000
Kursi Besi/Metal	Buah	16	49,500,000
Meja Rapat	Buah	1	29,590,000
Meja Resepsionis	Buah	1	5,500,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	2,200,000
Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	1,975,000
A.C. Split	Buah	7	45,550,000
Televisi	Buah	1	14,450,000
Mesin Pengering Pakaian	Buah	1	12,925,000
Camera Under Water	Buah	1	7,999,000
Camera Digital	Buah	1	14,405,050
Teropong/Keker	Buah	2	19,800,000
Kamera Udara	Buah	1	22,774,000
P.C Unit	Buah	2	19,760,000
Lap Top	Buah	5	64,995,000
Tablet PC	Buah	1	12,978,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	17,103,100

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 31 Desember 20201 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	999,285,430	1,090,342,900	(8.35)
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,419,400,840		
Peralatan dan Mesin - Penanganan		10,560,000	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	2,418,686,270	1,100,902,900	119.70
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2,418,686,270	1,100,902,900	119.70

Terjadi kenaikan nilai belanja modal peralatan dan mesin di Semester II 2021 dibandingkan tahun 2020, karena Nilai dan Jumlah belanja yang berbeda. Semester II 2021 berupa belanja modal Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat), dan roda 2 (dua), perlengkapan kantor, pengolah data, serta terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin yaitu Top Overhaul pada Kapal Pengawas Hiu 13. Sedangkan tahun 2020 terdiri dari Perlengkapan kantor, pengolah data, dan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp3.976.353.455,
00*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.976.353.455,00 dan Rp1.270.155.113,00. Belanja tersebut terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp153.971.700,00, belanja modal perencanaan dan pengawasan Gedung sebesar Rp116.003.250,00 dan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp3.706.378.505,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 20201 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	153,971,700	-	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	116,003,250	163,223,500	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,706,378,505	22,178,463	16,611.61
Jumlah Belanja Kotor	3,976,353,455	185,401,963	2,044.72
Pengembalian Belanja	-	16,149,750	0.00
Jumlah Belanja	3,976,353,455	169,252,213	2,249.37

Belanja modal Gedung dan bangunan periode 31 Desember 2021 berupa Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada kantor dan mess Pos Pengawasan SDKP Bula, serta Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung serta Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa pembangunan fisik kantor Stasiun PSDKP Ambon.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp15.313.400,0
0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan bulan Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.313.400,00 dan Rp0,00. Belanja penambahan nilai Jaringan berupa Penambahan Daya Listrik Kantor Stasiun PSDKP Ambon.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	0
Belanja Modal Irigasi	-	-	0
Belanja Modal Jaringan	-	-	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	-	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	-	-	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	15,313,400	-	0
Jumlah Belanja Kotor	15,313,400	-	0
Pengembalian Belanja	-	-	0
Jumlah Belanja	15,313,400	-	-

*Belanja Modal
Lainnya Rp0,00*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat belanja modal lainnya sampai dengan bulan Desember TA 2021.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0,00*

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Bulan September TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	-	-
Uang di Rekening : Bank Mandiri No. Acc 1520015655083 (2020) No. VA 8100122151411000 (2021)	-	-
Saldo BPP	-	-
Kuitansi yang belum di SP2Dkan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya Setara Kas sampai dengan 31 Desember 2021.

*Piutang PNB
Rp0,00*

C.4 Piutang PNB

Tidak terdapat saldo Piutang PNB sampai dengan 31 Desember 2021.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
Tidak terdapat tagihan tuntutan ganti rugi sampai dengan 31 Desember 2021.
Rp0,00

Bagian Lancar TPA **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sampai dengan 31 Desember 2021.
Rp0,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**
Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar sampai dengan 31 Desember 2021.
Rp 0,00

Belanja Dibayar di Muka **C.8 Beban Dibayar di Muka**
Terdapat Saldo beban Dibayar di Muka sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp61.458.333,00. Beban sewa di Stasiun PSDKP Ambon adalah :

1. Belanja sewa rumah a.n L. Mulyadi Marto, S.St.Pi, MP senilai Rp7.500.000,00 dari tanggal 25 April 2021 s.d 24 April 2022;
2. Belanja Sewa rumah a.n Didik Cipto Suryono, S.St.Pi senilai Rp4.166.667,00 dari tanggal 20 Februari 2021 s.d 20 Februari 2022;
3. Belanja Sewa rumah a.n Chaedar Afthon, S.Pi senilai Rp6.250.000,00 dari tanggal 03 April 2021 s.d 02 April 2022;
4. Belanja sewa kantor Wilker PSDKP Geser senilai Rp5.958.333,00 dari tanggal 04 Juni 2021 s.d 04 Juni 2022;
5. Belanja sewa kantor Wilker PSDKP Masohi senilai Rp4.583,333,00 dari tanggal 15 Juni 2021 s.d 15 Juni 2022;
6. Belanja sewa kantor Wilker PSDKP Tulehu senilai Rp.16.500.000,00 dari tanggal 16 November 2021 s.d 16 November 2022;
7. Belanja sewa kantor Wilker PSDKP Bula senilai Rp.16.500.000,00 dari tanggal 10 Desember 2021 s.d 10

Desember 2022.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima sampai dengan 31 Desember 2021.

Persediaan Rp105.982.400,00

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember TA 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp105.982.400,00 dan Rp199.957.800,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan sampai dengan 31 Desember TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	33,156,900	61,759,300
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	72,825,500	138,198,500
Barang Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	105,982,400	199,957,800

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor : B.5204/PSDKPSta.7/PL.450/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp33.156.900,00 terdiri dari alat tulis sebesar Rp573.000,00, tinta tulis dan tinta stempel sebesar Rp211.000,00, penjepit kertas sebesar Rp654.000,00, penghapus/korektor sebesar Rp5.000,00, buku tulis sebesar Rp35.000,00 ordner dan map sebesar Rp97.000,00, penggaris sebesar Rp12.500,00, cutter (alat tulis kantor) sebesar Rp109.000,00, alat perekat sebesar Rp203.000,00, isi staples sebesar Rp175.000,00, alat tulis kantor lainnya sebesar Rp960.000,00, kertas HVS sebesar Rp2.068.500,00, berbagai kertas Rp4.284.300,00, amplop Rp389.000,-, kertas dan cover

lainnya Rp76.000,00, Continuous Form sebesar Rp15.884.000,00, pita printer sebesar Rp150.000,00, tinta/toner printer Rp4.329.000,00, USB/FlashDisk Rp1.060.000,00, CD/DVD Drive Rp153.600,00, mouse sebesar Rp1.225.000,00, bahan computer lainnya sebesar Rp.120.000,00, baterai Rp18.000,00, stemple sebesar Rp240.000,00 serta alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp125.000,00.

Persediaan suku cadang sebesar Rp72.825.500,00, terdiri dari suku cadang alat angkutan apung bermotor sebesar Rp67.017.500,00 dan suku cadang lainnya Rp5.808.000,00. Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu 13.

*Tagihan TP
/TGR Rp0,00*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Panjang
Rp0,00

per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang

Tanah
Rp6.248.730.383,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.248.730.383,00 dan Rp6.248.730.383,00. Mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 30 Desember 2020	6.248.730.383
Mutasi tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2021	6.248.730.383
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	
Nilai Buku per 31 Desember 2021	6.248.730.383

Tanah pada Stasiun PSDKP Ambon per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp 6.248.730.383,- Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 5.838 m2 dengan nilai sebesar Rp 6.248.730.383,- mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Rincian data Tanah berdasarkan letak dan peruntukannya adalah sebagai berikut :

No	Lokasi/Alamat Aset Tanah	Luasan (m2)	Bukti Kepemilikan	Pengguna
1	Dwi Warna, Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah	572	SHP No. 00006	Satwas SDKP SBT
2	Jl. Ir. Putuhena, Rumah Tiga, Teluk Ambon, Kota Ambon	5266	SHP No. 45 & 46	Stasiun PSDKP Ambon

Peralatan dan
Mesin
Rp43.356.586.207,00,

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp43.356.586.207,00 dan Rp41,431,311,937,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	41,431,311,937
Mutasi tambah :	
Pembelian	999,285,430
Penambahan nilai peralatan dan mesin	1,419,400,840
Mutasi Kurang :	
Penghentian dari penggunaan	493,412,000
Saldo per 31 Desember 2021	43,356,586,207
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	26,949,197,133
Nilai Buku per 31 Desember 2021	16,407,389,074

Saldo perolehan nilai per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp41.431.311.937,-. Nilai ini mengalami perubahan pada Semester II tahun 2021 dengan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang. Mutasi tambah berupa pembelian peralatan dan mesin berupa mini bus (penumpang 14 Orang Kebawah), kendaraan roda 2 (dua), perlengkapan kantor, peralatan pengolah data, dan alat ukur yang berjumlah Rp999.285.430,00. Serta terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin berupa Top Overhaul pada Kapal Pengawas Hiu 13 sejumlah Rp1.419.400.840,00.

Mutasi kurang berupa penghentian penggunaan 1 (satu) buah Partisi Bahan Gypsum dan teralis sejumlah Rp130.412.000,- dan 1 (satu) unit speed boat/motor temple sejumlah Rp363.000.000,00.

*Gedung dan
Bangunan*

*Rp7.288.390.95
5,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp7.288.390.955,00 dan Rp5.199.295.547,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	5,199,295,547
Mutasi tambah :	
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,905,701,955
Mutasi kurang :	
Penghentian Penggunaan	1,701,586,547
Transfer Keluar	115,020,000
Saldo per 31 Desember 2021	7,288,390,955
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	332,035,742
Nilai Buku per 31 Desember 2021	6,956,355,213

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna

Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.288.390.955,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp5.199.295.547, mutase tambah sebesar Rp3.905.701.955,00 yang terdiri dari 1 (satu) unit pembangunan Gedung kantor Stasiun PSDKP Ambon (penyelesaian pembangunan melalui KDP), dan mutasi kurang sebesar Rp1.816.606.547,00 yang terdiri dari 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah senilai Rp1.701.586.547, serta transfer keluar berupa 1 (satu) unit Gedung Pos Jaga permanen ke PPN Ternate

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp512.761.400,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp512.761.400,00 dan Rp497.448.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	497,448,000
Mutasi tambah :	-
Penambahan Nilai Jaringan	15,313,400
Mutasi kurang	-
Saldo per 31 Desember 2021	512,761,400
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	55,898,508
Nilai Buku per 31 Desember 2021	456,862,892

Terdapat penambahan nilai jaringan sebesar Rp15.313.400,00 yaitu penambahan nilai jaringan berupa Penambahan Daya Listrik Kantor Stasiun PSDKP Ambon

Aset Tetap Lainnya
Rp7.975.000,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp7.975.000,- dan Rp7.975.000,-. Mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	7,975,000
Mutasi tambah :	
	-
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 30 Juni 2021	7,975,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	7,975,000

Untuk aset tetap lainnya, diperoleh melalui transfer masuk dari UPT. Pangkalan PSDKP Tual sesuai dengan BAST No. 977/Lan.6/PL.933/IX/2017 tanggal 13 September 2017, yakni satu buah peta senilai Rp 7.975.000,-

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp239.903.713
,00,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp239.903.713,00 dan Rp169.252.213,00

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	169,252,213
Mutasi tambah :	
Perolehan KDP	29,239,000
Pengembangan KDP	3,947,114,455
Mutasi kurang :	
Penyelesaian KDP	3,905,701,955
Saldo per 31 Desember 2021	239,903,713

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satker Stasiun PSDKP Ambon, antara lain :

- Transaksi KDP Henti Sementara karena adanya pemotongan anggaran terkait Corona Virus 19 di tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Mess Pimpinan dengan NUP 5 senilai Rp43.035.300,00 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
 - Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Gudang Logistik, dengan NUP 6 senilai Rp42.896.713,00 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
- Transaksi Perolehan KDP berupa Administrasi Proyek sebanyak 2 (Dua) kontrak senilai Rp29.239.000,00.

Rincian Perolehan KDP adalah sebagai berikut :

- Administrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP Seram Bagian Timur, nomor kontrak 094/Sta.7/PPK/V/2021, dikerjakan oleh CV. Data Teknik, dengan waktu pekerjaan (perencanaan) tanggal 04 Mei 2021 – 29 November 2021 senilai Rp20.749.153,00;
- Adminitrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Mess Operator Satwas PSDKP Seram Bagian Timur, nomor kontrak 012/Sta,7/PPK/II/2020, dikerjakan oleh CV. Kelaras Sejati, dengan waktu pekerjaan tanggal 04 Mei 2021– 29 November 2021 senilai Rp8.490.000,00.

Transaksi Pengembangan KDP berupa Perencanaan dan Administrasi Proyek sebanyak 9 transaksi senilai Rp880.788.093,00.

Rincian Pengembangan KDP adalah sebagai berikut :

- Administrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor, dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp13.329.000,00;
- Administrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor, dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp1.500.000,00;
- Pembayaran Uang muka 20% Belanja Modal Perluasan Kantor Stasiun PSDKP Ambon Tahap II dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp734.100.153,00;
- Administrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp6.039.140,00;
- Adminstrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp450.000,00;
- Adminstrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp2.267.000,00;

- Adminstrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP dikerjakan oleh CV. Data Teknik senilai Rp8.430.000,00;
- Pembayaran Termin I Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP dikerjakan oleh CV. Data Teknik senilai Rp67.716.000,00;
- Pembayaran Termin I Perencanaan Pembangunan Bangunan/mass operator dikerjakan oleh CV. Kelaras Sejati senilai Rp46.956.800,00;
- Adminstrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp450.000,00;
- Pembayaran Termin I Perluasan Kantor Stasiun PSDKP Ambon Tahap II dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp734.100.153,00;
- Adminstrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP dikerjakan oleh CV. Data Teknik senilai Rp842.550,00;
- Adminstrasi Proyek Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP dikerjakan oleh CV. Kelaras Sejati senilai Rp787.350,00;
- Adminstrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp125.000,00;
- Adminstrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp395.000,00;
- Pembayaran Termin II Perluasan Kantor Stasiun PSDKP Ambon Tahap II dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp734.100.153,00;
- Pembayaran Termin III Perluasan Kantor Stasiun PSDKP Ambon Tahap II dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp734.100.153,00;
- Pembayaran Termin IV Perluasan Kantor Stasiun PSDKP Ambon Tahap II dikerjakan oleh PT. Graha

- Chandra Mandiri senilai Rp550.575.115,00;
- o Pembayaran Pengawasan Perluasan Kantor Stasiun PSDKP Ambon Tahap II dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp97.515.000,00;
- o Pembayaran 20% Perencanaan Perluasan Kantor Stasiun PSDKP Ambon Tahap II dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp18.488.250,00;
- o Adminstrasi Proyek Perluasan Bangunan Kantor dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp11.322.600,00;
- o Pembayaran Retensi 5% Perluasan Kantor Stasiun PSDKP Ambon Tahap II dikerjakan oleh PT. Graha Chandra Mandiri senilai Rp183.525.038,00.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(27.337.131.
383,00)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing- masing Rp(27.337.131.383,00) dan Rp(23.972.424.864,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2021*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	6,248,730,383	-	6,248,730,383
2	Peralatan dan Mesin	43,356,586,207	26,949,197,133	16,407,389,074
3	Gedung dan bangunan	7,288,390,955	332,035,742	6,956,355,213
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	512,761,400	55,898,508	456,862,892
5	Aset Tetap Lainnya	7,975,000	-	7,975,000
Akumulasi Penyusutan		57,414,443,945	27,337,131,383	30,077,312,562

*Aset Tak
Berwujud*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) sampai dengan 31 Desember

Rp0,00

2021 dan 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada aset Tak Berwujud pada Kantor Stasiun PSDKP Ambon.

Aset Lain-Lain

C.22 Aset Lain-Lain

Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0,00 dan Rp102.958.500,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	102,958,500
Mutasi tambah :	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke aset lainnya	2,194,998,547
Mutasi Kurang :	-
Usulan barang rusak ke pengelola	2,297,957,047
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa BMN yang di hentikan dari penggunaannya Per 31 Desember 2021, antara lain:

- Mutasi tambah antara lain transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebanyak 3 (*Tiga*) unit kendaraan, terdiri dari :

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai
1	speedboat/motor tempel	1	363,000,000
2	Partisi	1	130,412,000
3	Bangunan Kantor Permanen	1	1,701,586,547
Jumlah		3	2,194,998,547

- Mutasi kurang antara lain :
 - ✓ 24 (*Dua Puluh Empat*) unit peralatan dan mesin dengan surat usulan Kepala Stasiun PSDKP Ambon kepada KPKNL Ambon, Nomor 1691/Sta.7/PL.800/IV/2021 tanggal 12 April 2021 senilai Rp102.958.500,- dan telah ditindak lanjuti oleh Sekretaris Ditjen PSDKP dengan Nota Dinas Nomor B.14853/PSDKP.0/PL.800/IV/2021 Tanggal 28 April 2021 yang terdiri :

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai
1	Alat Ukur Lainnya	3	1,740,000
2	Mesin Ketik Lainnya	1	1,450,000
3	Mesin Ketik	1	665,000
4	AC Split	2	4,744,000
5	loudspeaker	1	1,500,000
6	Camera digital	1	4,900,000
7	Teropong	1	739,000
8	Infra Red dan ultraviolet	2	2,000,000
9	uninterrupted power suply (UPS)	1	1,500,000
10	Meter	1	500,000
11	P.C	4	38,565,000
12	Lap top	2	40,000,000
13	Jaringan Telpon diatas tanah kapasitas kecil	1	490,000
14	Jaringan Radio	1	2,465,500
15	Peta (Map)	2	1,700,000
Jumlah		24	102,958,500

- ✓ 1 (satu) unit partisi sebesar Rp130.412.00,00
- ✓ 1 (satu) unit bangunan kantor permanen sebesar Rp1.701.586.547,00
- ✓ 1 (satu) unit speedboat sebesar Rp. 363.000.000,00

Akumulasi Penyusutan BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0,00

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp(99.275.478,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp10.914.681,00

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp10.914.681,00 dan Rp13.271.470,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian utang kepada pihak ketiga :

1. Biaya langganan Internet Kantor Stasiun PSDKP Ambon (Wailela) bulan Desember 2021 sebesar Rp2.467.000,00 ;
2. Biaya langganan listrik Kantor Stasiun PSDKP Ambon (Wailela) bulan Desember 2021 sebesar Rp 6.200.763,00 ;
3. Biaya langganan listrik Mess Stasiun PSDKP Ambon bulan Desember 2021 sebesar Rp956.502,00 ;
4. Biaya langganan listrik kantor Satwas SDKP Wilker Tulehu bulan Desember 2021 sebesar Rp250.416,00 ;
5. Biaya langganan air Kantor Satwas SDKP Ternate bulan Desember 2021 sebesar Rp1.040.000,00

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,00

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0,00

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp30.473.742.327,00

C.28 Ekuitas

Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah

masing-masing sebesar Rp30.473.742.327,00 dan Rp29.869.932.568,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

URAIAN EKUITAS	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Ekuitas Akhir	30,473,742,327	29,869,932,568	2.02
Jumlah Ekuitas	30,473,742,327	29,869,932,568	2.02

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp1.535.000,0

0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.535.000,00 dan Rp0,00

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,535,000	0	0
Jumlah Ekuitas	1,535,000	0	0

Penerimaan kembali belanja pegawai berupa tunjangan fungsional dan tunjangan umum a.n Lailia Nur Rohmah yang telah dilakukan pembayaran melalui pemotongan gaji induk bulan Oktober 2021 sebesar Rp1.535.000,00. Hal ini disebabkan karena kelebihan pembayaran tunjangan fungsional bulan Mei s/d September 2021 dan tunjangan umum bulan Agustus 2021.

Beban Pegawai

Rp4.584.586.98

9,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah beban Pegawai Stasiun PSKDP Ambon sampai dengan bulan September TA 2021 dan TA 2020 sebesar Rp4.584.586.989,00 dan Rp4.094.809.896,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Dibandingkan dengan TA 2020, beban belanja pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,968 % jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan adanya mutasi PNS dari beberapa instansi pusat maupun daerah sejumlah 11 (sebelas) orang pegawai. Rincian beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,817,879,740	1,567,295,320	15.99
Beban Pembulatan Gaji PNS	29,579	25,905	14.18
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	131,975,196	124,119,862	6.33
Beban Tunj. Anak PNS	38,223,482	32,752,968	16.70
Beban Tunj. Struktural PNS	20,520,000	22,680,000	(9.52)
Beban Tunj. Fungsional PNS	38,480,000	26,260,000	46.53
Beban Tunj. Beras PNS	120,579,300	93,494,220	28.97
Beban Uang Makan PNS	239,302,000	203,329,800	17.69
Beban Tunjangan Umum PNS	76,850,000	73,150,000	5.06
Beban Uang Lembur	53,227,000	57,250,000	(7.03)
Beban Tunj. Khusus/kegiatan	2,047,520,692	1,894,451,821	8.08
Jumlah Beban Pegawai	4,584,586,989	4,094,809,896	11.96

*Beban
Persediaan
Rp149.437.100
,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan bulan September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp149.437.100,00 dan Rp270.805.589,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan sampai dengan bulan
Desember 2021 dan 2020*

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	149,437,100	270,805,589	(44.82)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	0.00
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0.00
Jumlah	149,437,100	270,805,589	(44.82)

URAIAN	Nilai
Persediaan Habis pakai per 31 Desember 2020	199,957,800
Realisasi Belanja 521811 sampai 31 Desember 2021	120,834,700
Realisasi Belanja 521831 sampai 31 Desember 2021	-
Total Realisasi 31 desember 2021	120,834,700
	320,792,500
Beban persediaan Konsumsi	149,437,100
Beban Persediaan Suku Cadang	65,373,000
Total Beban	214,810,100
Selisih	105,982,400
Neraca 30 September 2021	105,982,400

Beban Barang dan Jasa
Rp6.756.771.134,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.756.771.134,00 dan Rp7.020.749.593,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	1,247,698,372	1,082,906,906	15.22
Beban penambah daya tahan tubuh	109,555,084	114,626,440	(4.42)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,577,760	28,230,200	(34.19)
Beban honor Operasional Satuan Kerja	180,240,000	161,502,000	11.60
Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID -19	138,602,982	119,798,484	15.70
Beban Bahan	3,908,606,073	4,152,996,267	(5.88)
Belanja Honor Output Kegiatan	56,520,000	5,150,000	997.48
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	531,344,500	976,746,610	(45.60)
Beban Langganan Listrik	108,233,226	122,735,925	(11.82)
Beban Langganan Telpon	106,721,961	96,761,912	10.29
Beban Langganan Air	27,134,500	31,261,285	(13.20)
Beban Sewa	116,277,576	10,325,000	1,026.18
Beban Jasa Profesi	5,800,000	18,300,000	
Beban Jasa Lainnya	105,185,100	66,726,564	57.64
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID -19	96,274,000	32,682,000	194.58
Jumlah	6,756,771,134	7,020,749,593	(3.76)

Beban Pemeliharaan
Rp1.434.819.295,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.434.819.295,00 dan Rp 1.923.607.416,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan dikarenakan semakin banyak belanja barang maupun Kontrak Pekerjaan baik itu Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Suku Cadang. Rincian beban pemeliharaan sampai dengan

September Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	204,483,800	195,844,000	4.41
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,164,962,495	1,612,311,486	(27.75)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	65,373,000	115,451,930	(43.38)
Jumlah	1,434,819,295	1,923,607,416	(25.41)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.413.988.4
53,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.413.988.453,00 dan Rp1.468.025.222,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban Perjalanan Dinas dikarenakan masa Pandemi Covid-19 sudah menurun dan kemudian banyak kegiatan dibuka kembali. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	748,175,840	920,831,519	(18.75)
Beban Perjalanan Tetap	134,700,334	131,934,724	2.10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	105,750,000	121,575,000	(13.02)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	93,092,700	25,900,509	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	332,269,579	267,783,470	24.08
Jumlah	1,413,988,453	1,468,025,222	(3.68)

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0,00 **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.939.982.960,00 **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.939.982.960,00 dan Rp4.242.971.419,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,812,657,744	4,118,316,947	(7.42)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	115,765,680	113,015,613	2.43
Beban Penyusutan Irigasi	8,233,934	8,233,934	-
Beban Penyusutan Jaringan	3,325,602	3,112,916	6.83
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	292,009	(100.00)
Jumlah	3,939,982,960	4,242,971,419	(7.14)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00 **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp8.932.084,0
0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing Rp8.932.084,00 dan Rp952.044,00. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,932,084	2,644,844	237.72
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	1,692,800	(100.00)
Jumlah	8,932,084	952,044	838.20

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Pendapatan berasal dari Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran lalu yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp8.932.084,- pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai dengan NTPN No. C863A7QLTSP86UN6. Hal ini disebabkan karena belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan November dan Desember 2020 a.n Puji Tri Laksono telah dibayarkan oleh Stasiun PSDKP Ambon, namun UPT yang baru juga melakukan pembayaran.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp29.869.932.
568,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon untuk periode 01 Januari 2021 dan 01 Januari 2020 masing-masing adalah sebesar Rp29.869.932.568,00 dan Rp36.182.933.641,00

*Defisit LO
Rp(19.880.352.
073,00)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan periode 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp(19.880.352.073,00) dan Rp(18.931.558.626,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,00*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp(5.663.681.000,00).

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,00

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp2.255.383.260,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Lain Rp0,00

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Stasiun SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp20.484.161.832,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp20.484.161.832,00 dan Rp16.026.855.293,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar entitas	2021	2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	20,621,820,818	16,120,041,671
Diterima dari Entitas Lain	(30,953,684)	(89,393,109)
Transfer Keluar	(106,705,302)	(3,793,269)
Transfer Masuk	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	20,484,161,832	16,026,855,293

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). sampai dengan 31 Desember 2021, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp (30,953,684,00) sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

sebesar Rp20.621.820.818,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Sedangkan transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(106.705.302,00).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Rp0,00.

Ekuitas Akhir
Rp30.473.742.
327,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.473.742.327,00 dan Rp29.869.932.568,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Telah dilakukan koreksi akun pada pembayaran lisensi aplikasi video conference, dari akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Lisensi aplikasi video conference) menjadi akun 521131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID19 - Lisensi aplikasi video conference) senilai Rp1.110.389,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. Temuan dan Tindak lanjut Temuan Inspektorat Jenderal

⇒ Berdasarkan surat Inspektur Jenderal KKP Nomor. ST-25.06.5/ITJ/TU.420/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 perihal hasil evaluasi Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Pesawat Patroli, Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan Penanganan barang bukti pada Stasiun PSDKP Ambon, Provinsi Maluku, melalui surat Nomor : 5073/ITJ/HP.410/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Hasil Evaluasi Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Pesawat Patroli, Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan Penanganan barang bukti pada Stasiun PSDKP Ambon, dimana Itjen KKP menginstruksikan :

- Nakhoda/Operator Kapal Pengawas untuk melengkapi data dukung, berupa laporan kerusakan pekerjaan perbaikan darurat, dan berita acara kerusakan atau kronologis kejadian pekerjaan darurat. Serta menginstruksikan kepada Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana selaku personil yang membidangi perawatan kapal untuk melengkapi data dukung berupa hasil analisa perbaikan untuk pekerjaan darurat.
- Mengupayakan kerja sama dengan Rumah Sakit/Puskesmas/ Klinik guna pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Awak Kapal Pelaku TPP

dengan alokasi anggaran yang tersedia.

- Melaksanakan pengadministrasian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara tertib sesuai kaidah yang ada.
- Berkoordinasi secara tertulis dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara dalam penanganan barang bukti TPKP yang telah selesai proses hukumnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Itjen KKP, Stasiun PSDKP Ambon telah menindaklanjuti melalui surat Nomor : 1432/Sta.7/TU.211/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal tindak lanjut hasil pemantauan.

⇒ Berdasarkan surat Inspektur Jenderal KKP Nomor. ST-25.06.5/ITJ/TU.420/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, melalui surat Nomor : 5079/ITJ/HP.550/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, perihal Hasil Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2021 pada Stasiun PSDKP Ambon, dimana Itjen KKP menginstruksikan :

- Melakukan percepatan PBJ target TW II dan selanjutnya melaksanakan PBJ sesuai RPD yang telah ditetapkan.
- Melengkapi data dukung yang memadai dalam menentukan harga satuan biaya langsung personil per hari, dan berkoordinasi dengan CV. Datateknik untuk memperbaiki Dokumen Usulan Administrasi dan Teknik.
- Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal dan bobot yang telah ditetapkan, mencatat bobot realisasi kemajuan pekerjaan, dan bobot kumulatif realisasi kemajuan pekerjaan minggu ke-12 dan memberikan teguran atas keterlambatan pekerjaan minggu ke 11.
- Memperbaiki kesalahan penghitungan laporan mingguan pengawas pada bobot deviasi kemajuan pekerjaan, dan bobot kumulatif deviasi kemajuan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Itjen KKP, Stasiun PSDKP Ambon telah menindaklanjuti melalui surat Nomor : 1433/Sta.7/TU.211/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal tindak lanjut hasil pemantauan.

⇒ Berdasarkan surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor. ST-29.10.9/ITJ/TU.420/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021

perihal Melaksanakan Pemantauan Pembangunan/Perluasan kantor UPT/Satwas Stasiun PSDKP Ambon, maka melalui surat Nomor : T.1045/ITJ/HP.550/XI/2021, tanggal 11 November 2021, perihal Hasil Pemantauan Perluasan Bangunan Pos Pengawasan PSDKP Stasiun PSDKP Ambon Tahap II. Hasil pemeriksaan fisik lapangan secara uji petik oleh Tim Inspektorat Jenderal, Konsultan Pengawas, PPK, dan Tim Teknis diketahui kondisi sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan progres pekerjaan oleh konsultan pengawas belum didukung dengan back up data perhitungan volume pekerjaan;
- b. Terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan dalam kontrak yang melebihi kebutuhan riil senilai Rp28.507.452,62 ;
- c. Terdapat ketidaksesuaian ukuran pintu pada pekerjaan “Pasang Daun Pintu Kebaya (double) Tempered 12 mm + engsel putar + kunci” sebanyak 2 pas/set dengan harga satuan Rp17.481.340,52. Akibatnya pintu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keluar/masuk mobilitas penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan terdapat selisih senilai Rp4.113.256,59;
- d. Terdapat realisasi posisi toilet lantai 1 sebanyak 1 unit dan lantai 2 sebanyak 1 unit yang tidak sesuai dengan gambar rencana.

Selanjutnya Itjen KKP menginstruksikan agar :

1. Melakukan CCO tambah kurang volume pekerjaan Perluasan Bangunan Pos Pengawasan PSDKP Stasiun PSDKP Ambon Tahap II senilai Rp32.620.709,21 untuk pemenuhan sarana/prasarana Bangunan Pos Pengawasan PSDKP, antara lain pembuatan ventilasi toilet dan sticker kaca dinding partisi/jendela/pintu; dan
2. PT Graha Chandra Mandiri selalu kontraktor pelaksana untuk melengkapi As Built Drawing pekerjaan Perluasan Bangunan Pos Pengawasan PSDKP Stasiun PSDKP Ambon Tahap II sesuai

dengan kondisi lapangan, dan II sesuai dengan kondisi lapangan; dan CV Rekaprima selaku konsultan pengawas pekerjaan Perluasan Bangunan Pos Pengawasan PSDKP Stasiun PSDKP Ambon Tahap II untuk membuat back up data perhitungan volume pekerjaan dan melakukan perhitungan riil terhadap seluruh pekerjaan untuk keperluan BAPF sebesar 100%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Itjen KKP, Stasiun PSDKP Ambon telah menindaklanjuti melalui surat Nomor : B.4953/PSDKPSta.7/TU.210/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 perihal tindak lanjut hasil pemantauan, yang berisikan :

Telah dilakukan tambah kurang pekerjaan, sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat perubahan volume pekerjaan, antara lain :
 - Pekerjaan persiapan,
 - Pekerjaan tanah pada pekerjaan lantai I,;
 - pekerjaan cat pada pekerjaan lantai I,;
 - pekerjaan cat pada pekerjaan lantai II; dan
 - pekerjaan akhir tidak ada perubahan.
- b. Terdapat perubahan volume pekerjaan, antara lain :
 - Pekerjaan pasangan pada pekerjaan Lantai I;
 - Pekerjaan beton pada pekerjaan lantai I;
 - Pekerjaan besi, alumunium, dan plafond pada pekerjaan Lantai I;
 - Pekerjaan besi penggantung dan kaca pada pekerjaan lantai I;
 - Pekerjaan instalasi listrik pada pekerjaan lantai I;
 - Pekerjaan pasangan pada lantai II;
 - Pekerjaan beton pada pekerjaan lantai II;
 - Pekerjaan besi, alumunium, dan plafond pada lantai II;
 - Pekerjaan besi penggantung dan kaca pada pekerjaan lantai II;
 - Pekerjaan instalasi listrik pada pekerjaan lantai II;

- Pekerjaan Ground Tank.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia jasa sepakat melakukan tambah kurang pekerjaan perluasan Pos Pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Ambon Tahap II sebagaimana diatas, maka tidak terdapat perubahan nilai kontrak. Kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan ke-2 dan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Nomor : 063/Sta.7/PPK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk paket pekerjaan perluasan Pos Pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Ambon Tahap II TA. 2021.

⇒ Berdasarkan Hasil Reviu Penyelesaian BMN Tidak ditemukan oleh Inspektorat Jenderal dengan surat tugas nomor : ST-05.11.6/IT /TU.420/XI/2021 tanggal 05 November 2021 – 13 November 2021 dengan menerbitkan Catatan Hasil Reviu (CHR) tanggal 13 November 2021 bahwa BMN yang tidak ditemukan hasil perbaikan penilaian kembali tahun 2020 merupakan penggabungan NUP dari Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 dan NUP 3 menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 dengan luas 758 m² menjadi 2.633 m², namun nilai wajar Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 pada LHIP nomor : LHIP-334/WKN.17/KNL.01/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tidak mengalami kenaikan (Rp1.504.289.000).

Terhadap BMN tidak ditemukan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 3 (Rp1.436.250.000) telah ditindaklanjuti oleh Stasiun PSDKP Ambon dengan melakukan koreksi pencatatan (penghapusan) pada SIMAK BMN. Sedangkan terhadap Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 setelah di periksa pada SIMAK BMN, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan koreksi nilai wajar (penambahan nilai aset) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 (Rp5.075.695.000) berdasarkan Surat keterangan Perbaikan Pencatatan Barang Milik Negara nomor 9887/ Sta.7/ PL/ 900/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018.

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 23 November 2020, kode *Digital Stamp (DS)* : 4460-8490-1859-9306 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp26.394.987.000 ,- (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 ini, Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali dengan keterangan sebagai berikut :

- **Revisi DIPA ke 01** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 08 Januari 2021, kode *Digital Stamp (DS)* : 3084-3359-4907-2366 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp26.394.987.000. Revisi I merupakan revisi kewenangan DJA. Digital Stamp mengalami perubahan, karena revisi 1 merupakan revisi buka blokir, disebabkan adanya perubahan nomenklatur pada sub komponen semula Perluasan Bangunan Fungsional Stasiun PSDKP Ambon Tahap II menjadi Bangunan Pos Pengawasan PSDKP dan terdapat kekurangan data dukung dalam penyusunan anggaran Stasiun PSDKP Ambon TA. 2021.
- **Revisi DIPA ke 02** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 21 Januari 2021, kode *Digital Stamp (DS)* : 3084-3359-4907-2366 dengan Nilai Pagu Anggaran 26.394.987.000. Revisi 2 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Digital stap tidak mengalami perubahan. Pada revisi 2 dilakukan pergantian akun karena terdapat kesalahan pencantuman akun pada RO Operasional Logistik Kapal Pengawas, yaitu akun 521211 dan 522191. Selain itu terdapat pergeseran antar RO dalam KRO yang sama yaitu:

- ✓ Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun;
 - ✓ Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran; dan
 - ✓ Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan lingkup DJPSDKP.
- **Revisi DIPA ke 03** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 16 Februari 2021, kode *Digital Stamp (DS)* : 1505-9428-7385-1308 dengan Nilai Pagu Anggaran 26.388.987.000. Revisi 3 merupakan revisi Refocusing 1. Digital Stamp mengalami perubahan. Adapun anggaran yang mengalami refocusing adalah yang mendapat blokir yaitu pada RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan lingkup DJPSDKP yaitu Pembinaan fisik dan mental pegawai.
 - **Revisi DIPA ke 04** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 16 September 2020, kode *Digital Stamp (DS)* : 5908-1422-6328-2501 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp29.842.783.000. Revisi 4 merupakan revisi kewenangan DJA. Digital stamp mengalami perubahan. Revisi 4 merupakan revisi pemanfaatan dan perubahan Halaman III DIPA. Adapun usulan pemanfaatan pada revisi 4 yaitu:
 - ✓ Penambahan KRO baru yaitu Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dengan pagu Rp50.000.000;
 - ✓ Penambahan Sub Komponen pada RO Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun diantaranya:
 - a. Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP pagu Rp 1.672.220.000;
 - b. Pembangunan Bangunan Operator pagu 1.071.576.000;
 - c. Perencanaan Pembangunan Dermaga Stasiun PSDKP Ambon pagu Rp300.000.000.
 - ✓ Penambahan anggaran suku cadang pada RO Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebesar Rp360.000.000.

- **Revisi DIPA ke 05** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2021 Tanggal 10 Agustus 2020, kode *Digital Stamp (DS)* : 1388-6449-4654-9036 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp29.556.783.000. Revisi 5 merupakan revisi kewenangan DJA. Revisi ini merubah Digital stamp. Revisi 5 adalah revisi Refocusing Tahap II, yaitu pengurangan Tunjangan Kinerja 13 dan THR Tunjangan Kinerja serta pergeseran anggaran antar kegiatan maupun antar RO, diantaranya:

 - ✓ Penambahan anggaran pada Sub komponen Perencanaan Pembangunan Dermaga Stasiun PSDKP Ambon;
 - ✓ Penambahan anggaran pada KRO Penanganan Perkara sebanyak Rp107.910.000 karena terdapat penambahan ouput kasus sebanyak 3 kasus yang telah P21. Sumber penambahan berasal dari BBM Kapal Pengawas pada kegiatan Pemantauan, Operasi Armada, dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan. Output KRO menjadi 15 perkara;
 - ✓ Sisa pengadaan kendaraan operasional roda 4 Satwas SDKP Ternate dioptimalisasi untuk pengadaan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 2 unit sehingga ouput pada KRO Layanan Saranan Internal menjadi 55 unit.
- **Revisi DIPA ke 06** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 08 Juli 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 1388-6449-4654-9036 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp29.556.783.000. Revisi 6 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Revisi ini teidak merubah digital stamp. Revisi 6 adalah revisi penambahan akun PC – PEN pada seluruh kegiatan dan revisi perubahan halaman III DIPA. Adapun rincian revisi adalah :

 1. Penambahan akun Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 522912 pada seluruh kegiatan;

2. Penambahan akun Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 521131 pada RO Operasi Kapal Pengawas, RO Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dan RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan lingkup DJPSDKP.

- **Revisi DIPA ke 07** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 22 Juli 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 7607-3020-6554-7006 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp24.966.872.000.- Revisi 7 merupakan revisi refocusing Tahap III dan termasuk kewenangan DJA. Pada revisi ini terdapat penghapusan/penghematan pada KRO dan RO. Terdapat pengurangan pagu sebesar Rp 4.589.911.000,-. Pagu sebelum revisi Rp29.556.783.000,- menjadi Rp24.966.872.000.-. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Penghapusan KRO 2350.CAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp50.000.000,-
2. Penghematan pada KRO 2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam sebesar Rp432.115.000,-
3. Penghematan pada KRO 2350.RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan sebesar Rp3.082.618.000,-. Sumber penghematan berasal dari penghapusan kegiatan fisik bangunan pos pengawasan SDKP dan pembangunan bangunan operator
4. Penghematan pada KRO 2351.AEA Koordinasi TPKP sebesar Rp40.598.000,-
5. Penghematan pada KRO 2351.BCE Penanganan Perkara sebesar Rp32.665.000,-
6. Penghematan pada KRO 2352.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp25.800.000,-
7. Penghematan pada KRO 2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp197.290.000,-

8. Penghematan pada KRO 2353.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp64.050.000,-
 9. Penghematan pada KRO 2353.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp242.767.000,-
 10. Penghematan pada KRO 2355.EAA Layanan Perkantoran sebesar Rp122.308.000,-
 11. Penghematan pada KRO 2355.EAC Layanan Umum sebesar Rp24.550.000,-
 12. Penghematan pada KRO 2355.EAD Layanan Sarana Internal sebesar Rp78.800.000,-
 13. Penghematan pada KRO 2355.EAF Layanan SDM sebesar Rp97.150.000,-
 14. Penghematan pada KRO 2355.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan sebesar Rp99.200.000,-
- **Revisi DIPA ke 08** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 760-0690-6700-0525 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000. Revisi 8 merupakan revisi anggaran refocusing Tahap IV termasuk kewenangan DJA. Terdapat pengurangan pagu sebesar Rp4.202.222.000,-. Pagu sebelum revisi Rp24.966.872.000,- menjadi Rp20.764.650.000,-. Adapun rincian sebagai berikut:
 1. Penghematan pada KRO 2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam sebesar Rp2.679.751.000,-
 2. Penghematan pada KRO 2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan sebesar Rp1.451.256.000,-
 3. Penghematan pada KRO 2351.AEA Koordinasi TPKP sebesar Rp48.402.000,-
 4. Penghematan pada KRO 2351.BCE Penanganan Perkara sebesar Rp2.215.000,-
 5. Penghematan pada KRO 2353.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp20.598.000,-

- **Revisi DIPA ke 09** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 760-0690-6700-0525 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000,-. Revisi 9 merupakan revisi kewenangan Kanwil DJPB. Adapun revisi yang dilakukan yaitu pergeseran anggaran dalam RO yang sama tidak mengurangi pagu RO dan volume output.
- **Revisi DIPA ke 10** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 4651-6012-4602-9785 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000,00. Revisi 10 merupakan revisi kewenangan DJA. Adapun revisi yang dilakukan yaitu pada :

 1. Revisi antar KRO pada 2350.QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam, ke 2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, yaitu: Pengurangan RO 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas (PEN) dari belanja dukungan penanganan pandemi COVID-19 Awak Kapal Pengawas sebesar Rp20.000.000,00 ke RO 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat (PEN);
 2. Kekurangan belanja perawatan darurat Kapal Pengawas HIU 13 dikarenakan adanya tagihan dari penyedia tanggal 29 September 2021 sebesar Rp31.900.000,00, sedangkan sisa anggaran sampai dengan 19 Oktober 2021 adalah Rp17.150.475,00
- **Revisi DIPA ke 11** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 29 November 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 6109-0013-0440-5012 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000,00. Revisi 11 merupakan revisi kewenangan kanwil DJPB. Adapun revisi yang dilakukan untuk:

1. Pemenuhan belanja operasional. Terdapat kelebihan anggaran pada RO 2355.EAA.001 yaitu pada belanja pegawai sebesar Rp97.612.000,- dan digeser ke RO 2355.EAA.002 untuk memenuhi operasional dan pemeliharaan kantor sampai dengan akhir tahun;
2. Penambahan volume output RO 2355.EAD.003 yaitu belanja mesin pemotong rumput, sehingga volume output semula 35 unit menjadi 36 unit; dan
3. Pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama.

- **Revisi DIPA ke 12** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor : SP DIPA. 032.05.2.215141/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Kode *digital stamp (DS)* : 6109-0013-0440-5012 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp20.764.650.000,00. Revisi 12 merupakan revisi pemutakhiran data POK.

c. Belanja Dibayar Dimuka

Terdapat Saldo beban Dibayar di Muka sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp61.458.333,00. Beban sewa di Stasiun PSDKP Ambon adalah :

- ⇒ Belanja sewa rumah a.n L. Mulyadi Marto, S.St.Pi, MP senilai Rp7.500.000,00 dari tanggal 25 April 2021 s.d 24 April 2022;
- ⇒ Belanja sewa rumah a.n Didik Cipto Suryono, S.St.Pi senilai Rp4.166.667,00 dari tanggal 20 Februari 2021 s.d 20 Februari 2022;
- ⇒ Belanja sewa rumah a.n Chaedar Afthon, S.Pi senilai Rp6.250.000,00 dari tanggal 03 April 2021 s.d 02 April 2022;
- ⇒ Belanja sewa kantor Wilker PSDKP Geser senilai Rp5.958.333,00 dari tanggal 04 Juni 2021 s.d 04 Juni 2022;
- ⇒ Belanja sewa kantor Wilker PSDKP Masohi senilai Rp4.583,333,00 dari tanggal 15 Juni 2021 s.d 15 Juni 2022;

⇒ Belanja sewa kantor Wilker PSDKP Tulehu senilai Rp.16.500.000,00 dari tanggal 16 November 2021 s.d 16 November 2022;

⇒ Belanja sewa kantor Wilker PSDKP Bula senilai Rp.16.500.000,00 dari tanggal 10 Desember 2021 s.d 10 Desember 2022

d. Belanja BBM

Stasiun PSDKP Ambon memiliki 1 unit kapal pengawas Hiu 13. Berkaitan dengan pengendalian Bahan Bakar Minyak Berita Acara Pemakaian Bahan Bakar :

No	Bulan	Nomor BA	Tanggal	Uraian
1	Januari	018/HIU.13/S ta.7/PW.431/II /2021	1-Feb-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 6.400 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 300 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 6.100 liter
2	Februari	113/HIU.13/S ta.7/PW.431/II I/2021	1-Mar-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 6.100 liter
				Jumlah Pengisian = 35.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 37.700 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 3.400 liter
3	Maret	179/HIU.13/S ta.7/PW.431/II I/2021	31-Mar-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 3.400 liter
				Jumlah Pengisian = 40.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 32.900 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 10.500 liter
4	April	247/HIU.13/S ta.7/PW.431/I V/2021	30-Apr-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 10.500 liter
				Jumlah Pengisian = 45.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 46.500 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 9.000 liter
5	Mei	288/HIU.13/S ta.7/PW.431/ V/2021	31-Mei-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 9.000 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 7.400 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 1.600 liter
6	Juni	370/HIU.13/S ta.7/PW.431/ VI/2021	30-Jun-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 1.600 liter
				Jumlah Pengisian = 62.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 57.300 liter

				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 6.300 liter
7	Juli	413/Hiu13/St a.7/PW.431/VI I/2021	31-Jul-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya =6.300 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 3.800 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 2.500 liter
8	Agustus	455/Hiu13/St a.7/PW.431/VI II/2021	31-Agust- 21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya =2.500 liter
				Jumlah Pengisian = 10.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 6.000 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 6.500 liter
9	September	505/Hiu13/St a.7/PW.431/IX /2021	30-Sep-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 6.500 liter
				Jumlah Pengisian = 20.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 23.800 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 2.700 liter
10	Oktober	547/Hiu13/St a.7/PW.431/X / 2021	31-Okt-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 2.700 liter
				Jumlah Pengisian = 21.000 liter
				Jumlah Pemakaian = 21.650 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 2.050 liter
11	November	557/Hiu13/St a.7/PW.431/XI / 2021	30-Nov-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 2.050 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 950 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 1.100 liter
12	Desember	580/Hiu13/St a.7/PW.431/XI I/ 2021	31-Des-21	Sisa BBM Akhir Bulan sebelumnya = 1.100 liter
				Jumlah Pengisian = 0 liter
				Jumlah Pemakaian = 100 liter
				Sisa BBM Akhir Bulan ini = 1.000 liter

Stasiun Pengawasan SDKP Ambon Mengalokasikan Anggaran Belanja BBM sebesar Rp2.892.493.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar 100%.

e. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan
Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2021*

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	6.248.730.383	0
2	Peralatan dan Mesin	42.928.500.777	428.085.430
3	Gedung dan Bangunan	3.382.689.000	3.905.701.955
4	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	512.761.400	0
5	Aset Tetap Lainnya	7.975.000	0
6	Aset Tak Berwujud	0	0
TOTAL		53.080.656.560	4.333.787.385

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon adalah sebagai berikut :

Daftar Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2021

No	No SK	Tanggal SK	Aset yang di PSP	Nilai Aset (Rp)
1	218/KEMEMKP/SJ/P L.930/2019	15 Maret 2019	Alat dan Mesin dibawah 100 jt	2.846.001.991
2	11/KM.6/WKN.17/K NL.01/2019	05 Maret 2019	Kendaraan	1.588.483.130
3	27/KM.6/WKN.17/K NL.01/2019	25 April 2019	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	130.412.000
4	20/KM.6/WKN.17/2019	09 Mei 2019	Speed Boat	6.614.803.767
5	195/KEMEMKP/SJ/P L.930/2019	13 Maret 2019	Bangunan Air	51.148.000
6	23/KM.6/WKN.17/K NL.01/2019	09 April 2019	Jalan Bangunan Air dan Jaringan di atas 100 jt	326.450.000
7	31/KM.6/WKN.17/K NL.01/2017	05 Juni 2017	Tanah	2.024.750.000
8	44/KM.6/WKN.17/K NL.01/2019	27 Juni 2019	Tanah	244.736.842
9	53/KM.6/WKN.17/K NL.01/2019	05 Agustus 2019	Gedung dan Bangunan	4.734.997.552
10	735/KEMENKP/SJ/P L.930/2019	30 Oktober 2019	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	122.805.500
11	31/KEPMENKP/SJ/P L.930/2020	30 Januari 2020	Alat dan Mesin dibawah 100 jt	242.263.160
12	120/KM.6/WKN.17/K NL.01/2020	23 Juli 2020	Kapal Pengawas Perikanan	29.431.253.750
13	174/KEPMENKP/SJ/PL.930/2021	12 April 2021	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	531.149.700
14	102/KM.6/WKN.17/K NL.01/2021	28 Juni 2021	Kendaraan	569.753.200
15	185/KM.6/WKN.17/K NL.01/2021	15 November 2021	Kendaraan	608.700.000

Aset yang belum ditetapkan status penggunaannya (PSP) adalah sebanyak 6 NUP senilai Rp867.253.200,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang merupakan pengadaan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Barang Milik Negara Yang Belum Penetapan Status Penggunaan Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon

Per 31 Desember 2021

KODE	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	3.905.701.955
3050204004	A.C Split	Unit	7	45.550.000
3060105037	Teropong	Unit	2	19.800.000
3050206041	Mesin Pengering	Unit	1	12.925.000
3050203001	Mesin Penghisap Debu	Unit	1	2.200.000
3100203003	Printer	Unit	5	17.103.100
3060102127	Camera Underwater	Unit	1	7.999.000
3050103009	Mesin Fotocopy	Unit	1	25.500.000
3100102002	Laptop	Unit	5	64.995.000
3060102128	Camera Digital	Unit	1	14.405.050
2100102009	Tablet PC	Unit	1	12.978.000
3100102001	P.C Unit	Unit	2	19.760.000
30303011999	Alat Ukur Lainnya	Unit	4	15.135.765
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Unit	2	4.365.515
3060105047	Kamera Udara	Unit	1	22.774.000
3050206002	Televisi	Unit	1	14.450.000
30502201003	Kursi Besi/Metal	Unit	16	49.500.000
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1.650.000
3050201008	Meja Rapat	Unit	1	29.590.000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Unit	4	12.540.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Unit	6	27.390.000
13050201014	Meja Resepsionis	Unit	1	5.500.000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	1.975.000
TOTAL			66	4.333.787.385

e. Penghapusan BMN

Adapun pengelolaan BMN berupa penghapusan BMN per 31 Desember 2021 telah di terbitkan SK Penghapusan dengan rincian :

- SK Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomr : 253/KEPMEN-KP/SJ/PL.820/2021 Tanggal 05 Mei 2021 senilai Rp36.598.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) berupa 2 (dua) unit sepeda motor;
- SK Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomr : 524/KEPMEN-KP/SJ/PL.820/2021 Tanggal 29 September 2021 senilai Rp155.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) berupa 1 (satu) unit Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah);
- SK Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

nomr : 685/KEPMEN-KP/SJ/PL.820/2021 Tanggal 10 November 2021 senilai Rp1.135.271.8000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) berupa 1 (satu) unit Bongkaran Gedung Kantor Permanen dan 1 (satu) unit Partisi;

- o SK Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomr : 815/KEPMEN-KP/SJ/PL.820/2021 Tanggal 17 Desember 2021 senilai Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) berupa 1 (satu) sepeda motor.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang akan dilaksanakan lelang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Proses lelang 2 (dua) unit Sepeda Motor dengan nilai sebesar Rp38.289.130,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).
- b) Telah diterbitkan Surat Persetujuan penjualan dari kementerian Kelautan dan Perikanan berupa 1 (Satu) unit Speedboat/Motor tempel dengan nilai sebesar Rp363.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*), 20 (dua puluh) unit peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp98.303.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah*), dua (dua) unit jaring dengan nilai sebesar Rp2.995.500,00 (*Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) dan 2 (dua) unit Aset Tetap Lainnya dengan nilai sebesar Rp1.700.000,00 (*Satu juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

f. Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Stasiun PSDKP Ambon mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp263.658.000,00 Anggaran tersebut terserap 89,08% yakni sebesar Rp234.876.982,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	143,608,000	138,602,982	96.51
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	120,050,000	96,274,000	80.19
Jumlah		263,658,000	234,876,982	89.08

Rincian belanja Penanganan Pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Akun	Uraian Belanja COVID-19	Realisasi
1	521131	Masker Kesehatan	95,078,337
2		Hand Sanitizer	28,128,370
3		Cairan Disinfektan	12,360,393
4		Biaya Lisensi Aplikasi Video Conference	3,035,882
5	522192	Pemeriksaan Rapid Tes/Swab	96,274,000
Total			234,876,982

g. Tangging PC-PEN

Stasiun PSDKP Ambon mendapatkan tagging terkait PC-PEN pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.259.867.000,00 pada RO 2350.BID.001 yaitu kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya; 2350.QHD.001 yaitu kegiatan Operasi Kapal Pengawas; dan 2350.RCG.001 yaitu kegiatan Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat. Sampai dengan tanggal 31 desember 2021, realisasi sebesar Rp6.226.850,00 atau 99,46%. Berikut realisasi belanja akun PC-PEN TA. 2021

Tabel Realisasi belanja PC-PEN Stasiun PSDKP Ambon TA. 2021

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	11,100,000	10,679,000	96.21
2	Operasi Kapal Pengawas	3,753,731,000	3,731,714,742	99.41
3	Armada Pengawasan SDKP yang dirawat	2,506,136,000	2,494,428,108	99.53
Jumlah		6,259,867,000	6,226,142,850	99.46

Keterangan :

 : Tagging PC-PEN dari Kemenkeu

 : Tagging PC-PEN DIPA Stasiun PSDKP Ambon

Belanja yang bukan merupakan PC-PEN namun mendapatkan tagging dari Kemenkeu adalah RO 2350.BID.001 yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang

dievaluasi keaktifannya. Pada DIPA Stasiun PSDKP Ambon, tagging PC-PEN terdapat pada RO 2350.QHD.001 yaitu Operasi Kapal Pengawas, dan RO 2350.RCG.001 yaitu Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat.

Realisasi belanja PC-PEN pada Kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya TA. 2021

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
521211	Belanja Bahan	200,000	-	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,900,000	10,679,000	97.97
Jumlah		11,100,000	10,679,000	96.21

Pagu belanja kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) pada RKAKL sebesar Rp12.600.000,- namun tidak semua masuk kedalam tagging PC-PEN. Hanya sebesar Rp11.100.000,- yang masuk dalam tagging PC-PEN, dengan rincian akun 524111 yaitu Belanja perjalanan dinas dalam rangka tindak lanjut informasi POKMASWAS sebesar Rp10.900.000,- serta pada akun 521211 yaitu belanja bahan Pencetakan Laporan Semester sebesar Rp200.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi pada OMSPAN sebesar Rp 10.679.000,- atau 96,21%.

*Realisasi belanja PC-PEN pada kegiatan
Operasi Kapal Pengawas TA. 2021*

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
052	Penyediaan logistik kapal pengawas	2,978,645,000	2,977,409,850	99.96
A	Dukungan Logistik Kapal			
521211	Belanja Bahan	2,933,855,000	2,932,649,000	99.96
522191	Belanja Jasa Lainnya	27,900,000	27,900,000	100.00
B	Dukungan Logistik Lainnya			
521211	Belanja Bahan	600,000	590,050	98.34
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,290,000	16,270,800	99.88
053	Penyediaan logistik Awak Kapal Pengawas	708,236,000	705,091,542	99.56
A	Dukungan Logistik Awak Kapal Pengawas			
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	67,640,000	67,553,084	99.87
521211	Belanja Bahan	206,400,000	203,487,400	98.59
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	288,328,000	288,212,500	99.96
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130,000,000	129,990,558	99.99
B	Penyegaran Kemampuan Menembak AKP dan Pengawas Perikanan			
521211	Belanja Bahan	10,468,000	10,448,000	99.81
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	5,400,000	100.00
055	Operasional Awak Kapal Pengawas	66,850,000	49,213,350	73.62
A	Medical Check Up Bagi Awak Kapal Pengawas			
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,600,000	14,148,000	90.69
B	Dukungan Penanganan Pandemi COVID-19 Awak Kapal Pengawas			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan	32,250,000	27,700,350	85.89
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,000,000	7,365,000	38.76
Jumlah		3,753,731,000	3,731,714,742	99.41

Pagu belanja pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp3.753.731.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.731.714.742,- atau 99,41%, dengan rincian kegiatan antara lain, Penyedia Logistik Kapal Pengawas, Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas, dan Operasional Awak Kapal Pengawas.

*Realisasi belanja PC-PEN pada kegiatan Armada Pengawasan
SDKP yang Dirawat TA. 2021*

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
051	Perawatan Pencegahan (preventive) Kapal Pengawas	98,502,000	98,491,680	99.99
A	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,000,000	38,991,580	99.98
B	Pengadaan Suku Cadang			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59,502,000	59,500,100	100.00
052	Perawatan Prediktif (predictive) Kapal Pengawas	1,694,770,000	1,686,589,137	99.52
A	Perawatan Tahunan			
522191	Belanja Jasa Lainnya	39,900,000	39,776,000	99.69
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	250,000	199,000	79.60
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,000,000	187,781,000	98.83
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,840,000	10,850,000	68.50
B	Overhaul Permesinan Kapal Pengawas			
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,420,000	3,420,000	100.00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,200,000	1,050,000	87.50
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,160,000	24,112,297	99.80
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,420,000,000	1,419,400,840	99.96
053	Perawatan Darurat (breakdown maintenance) Kapal Pengawas	291,900,000	290,731,125	99.60
A	Perawatan Darurat Kapal Pengawas			
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	600,000	525,000	87.50
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	279,800,000	278,716,525	99.61
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,500,000	11,489,600	99.91
054	Perawatan Pencegahan (preventive) Speed Boat/Rigid Inflatable Boat	103,800,000	102,793,060	99.03
A	Perawatan Rutin Bulanan			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,800,000	13,792,720	99.95
B	Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Speed Boat/ Rigid Inflatable Boat			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,000,000	89,000,340	98.89
056	Perawatan Darurat (breakdown maintenance) Speed Boat/Rigid Inflatable	317,164,000	315,823,102	99.58
A	Perawatan Darurat			
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	317,164,000	315,823,102	99.58
Jumlah		2,506,136,000	2,494,428,104	99.53

Selanjutnya pagu belanja pada kegiatan Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebesar Rp2.506.136.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.494.428.108,- atau 99,53%. Jumlah keseluruhan pagu PC-PEN pada DIPA Stasiun PSDKP sebesar Rp6.259.867.000,- dengan realisasi sebesar Rp6.226.142.850,- atau 99,46% dengan rincian kegiatan antara lain, Perawatan Pencegahan (preventive) Kapal

Pengawas, Perawatan Prediktif (predictive) Kapal Pengawas, Perawatan Darurat (breakdown maintenance) Kapal Pengawas, Perawatan Pencegahan (preventive) Speed Boat/Rigid Inflatable Boat, dan Perawatan Darurat (breakdown maintenance) Speed Boat/Rigid Inflatable.